

IMPLEMENTASI *LIGHT FOOTPRINT STRATEGY* AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGANI KELOMPOK AL SHABAAB DI SOMALIA

Oleh: Kalwa El Chirri

(kalwa.el0051@student.unri.ac.id)

Pembimbing: Saiman Pakpahan, S.IP., M.Si

Bibliografi: 18 Buku, 7 Jurnal, 45 Website dan Berita

Jurusan Hubungan Internasional

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63277

Abstract

United States took an important role in eradicating terrorism after 9/11, and the War on Terrorism was born. Somalia is a country that has had a prolonged conflict since President Siad Barre experienced the emergence of groups that were initially rebellious against the government. Then these groups became militant groups and even affiliated with global terrorism. One of the largest groups is Al Shabaab. This study aims to find out how to implement the Light Footprint Strategy. This strategy is a military strategy since President Barack Obama is known to eradicate attacks.

To research this topic, the research method used is qualitative, to explain the implementations carried out by the United States in eradicating Al Shabaab. Then the theory used is the implementation of policies by Merilee S. Grindle, which explains how a policy becomes possible to be realized. The perspective used is realism. Given the above background, the author decided to use the concept of national interest, where the United States has a specific goal in implementing the strategy, and collected data using Library Research method

The results of this thesis show that the implementation of policy carried out by the US can kill several key Al Shabaab leaders, so far the acceptable result is the death of Al Shabaab leaders, then the US claims the success of its air strikes. Unfortunately, Al Shabaab's presence in Somalia is quite strong in Africa.

Key Words : Al Shabaab, War on Terrorism, Policy Implementation, National Interest.

PENDAHULUAN

Tulisan ini menganalisis tentang salah satu kebijakan Amerika Serikat untuk menangani salah satu kelompok bersenjata yang cukup kuat di Somalia, yaitu Al Shabaab. Somalia yang mengalami transisi ideologi dan pemerintahan menyebabkan ketidakstabilan keamanan, sosial, dan politik. Hal ini mengakibatkan pro-kontra masyarakat Somalia yang kemudian menjadi faktor-faktor pendorong munculnya kelompok-kelompok bersenjata, salah satu dari kelompok militan tersebut adalah Al Shabaab.

Al Shabaab adalah kelompok pemberontak yang berbasis di Somalia ini pernah menguasai Mogadishu dan sebagian besar pedesaan di Somalia, dalam beberapa tahun terakhir Uni Afrika melakukan pemberantasan terhadap kelompok ini. Akan tetapi, keamanan jelas menjadi hal sensitif di Somalia yang seringkali terjadi konflik. Pemimpin Al Shabaab saat ini adalah Ahmed Umar setelah pendahulunya Ahmed Abdi Godane.¹ Kelompok ini disinyalir memiliki hubungan dengan kelompok teroris yang cukup terkenal, yaitu Al-Qaeda. Al Shabaab berasal dari milisi yang berafiliasi dengan *Islamic Courts Union* (ICU),² sebuah federasi pengadilan Islam yang berbasis klan yang telah didirikan di Somalia selatan pada

tahun 2004 untuk memerangi pelanggaran hukum yang melanda tempat tersebut sejak runtuhnya pemerintahan Mohamed Siad Barre, akan tetapi sekitar tahun 2004 milisi ini bertindak sebagai sayap bersenjata.³ Kelompok bersenjata inilah yang kemudian membentuk lahirnya kelompok Al Shabaab.

Amerika Serikat adalah negara superpower dan memainkan peranan penting dalam politik internasional. Pasca tragedi serangan bom 11 September 2001 di gedung *World Trade Center* (WTC) yang merupakan pusat perdagangan dan pentagon sebagai simbol sekaligus Pusat Pertahanan AS. Kemudian AS membuat kebijakan luar negeri yang berdampak luas ke kawasan dunia, yaitu *War on terrorism*.⁴ Adapun *War on terrorism* adalah bentuk perlawanan AS terhadap gerakan-gerakan terorisme.

Amerika Serikat kemudian melakukan beberapa upaya dalam memerangi kelompok militan Al Shabaab di Somalia sebagai upaya dari kontra terorisme. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah *Light Footprint*, *Light Footprint* pernah digunakan Amerika Serikat dalam konflik Irak-Afganistan. Adanya keterbatasan intervensi untuk memerangi teroris, Presiden George W Bush mengembangkan

¹ Claire Felter, Jonathan Masters, dan Mohammed Aly Sergie, "Al-Shabaab, Council on Foreign Relations," diakses dalam <https://www.cfr.org/backgrounder/al-shabab> pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 20:12 wib

² Harun Maruf dan Dan Joseph. *Inside Al Shabaab : The Secret History of Al-Qeda's Most Powerful Ally*. Bloomington, India University Press, 2018, hal. 10

³Britannica, "Al-Shabaab Somali-based militant group," diakses dalam <https://www.britannica.com/topic/al-Shabaab> pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 23:11 wib

⁴ U.S. Department of State Archive, "The Global War on Terrorism: The First 100 Days," diakses dalam <https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm> pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 00:16 wib

pendekatan parallel yang mengandalkan kehadiran militer Amerika Serikat dalam kasus untuk melakukan penyerangan kepada kelompok-kelompok target menggunakan operasi khusus dan kekuatan udara. Kemudian Presiden Barrack Obama mengubah *Light Footprint* menjadi upaya utama dalam *counterterrorism* AS, lalu strategi ini digunakan untuk memerangi teroris, dalam penelitian ini kelompok Al Shabaab.

KERANGKA DASAR TEORI

a. Realisme

penulis dalam penelitian ini menggunakan perspektif realisme. Realisme menganggap bahwa negara-negara atau state adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Realisme mengakui adanya institusi atau organisasi yang lain, namun kekuatan mereka terbatas.⁵ Menurut realisme semua pemimpin tidak peduli apa persuasi politik atau ideologi mereka, ketika dihadapkan untuk mengelola urusan negara yang bersifat bertahan hidup dalam lingkungan internasional yang kompetitif, negara hidup dalam konteks anarki dengan tidak adanya pihak yang bertanggung jawab secara internasional.

Realisme merupakan perspektif yang melihat bahwa negara berdaulat adalah aktor utama, oleh karena itu ada dua jenis kedaulatan yang berkaitan dengan negara, yaitu : kedaulatan internal berarti penyelenggaraan otoritas di dalam sebuah wilayah tertentu dan terhadap orang-orang tertentu. Sementara itu

⁵ International Relations Theory, *Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan*

kedaulatan eksternal meliputi kedaulatan eksternal meliputi pengakuan dari negara-negara lain untuk berhak bertindak bebas di dalam urusan internasional.⁶ Menurut perspektif realisme, selain negara yang berdaulat, kekuasaan adalah poin penting dalam hubungan internasional. Pada dasarnya kekuasaan bisa dianggap sebagai konsep persaingan, seperti otoritas, pengaruh, dan paksaan.

Demi kepentingan nasional, Somalia memberikan mandat kepada Amerika Serikat yang mempunyai kebijakan *Global War Against on Terrorism* untuk menangani kelompok Al Shabaab. Tentunya, Amerika Serikat memiliki motif tersendiri dengan membantu pemerintah Somalia ini. Kemudian Amerika Serikat melakukan beberapa upaya untuk menghabisi kelompok ini, salah satu upaya yang digunakan adalah *Light Footprint Strategy* yang cukup menjadikan tanda tanya bagi peneliti, karena implementasi dari pendekatan ini memakan korban jiwa dari masyarakat sipil.

b. Tingkat Analisa : Negara

Penulis menggunakan level analisa negara dalam mengkaji *Global War on Terrorism* Amerika Serikat, yang mana pada proposal ini adalah kebijakan *Light Footprint Strategy*. Level analisis negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor, baik birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif didalam negara berperan mengambil kebijakan luar negeri. Pada penelitian ini, Presiden Barrack

Internasional. England, E-International Relations Publishing, 2017, hal. 13

⁶ Ibid, hal. 60

Obama sebagai aktor internasional membuat kebijakan *Light Footprint Strategy* atau strategi jejak cahaya yang dicetuskan sebagai kontra terorisme untuk menangani kelompok-kelompok bersenjata. Selain itu, Amerika Serikat juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Somalia dalam menjalankan misinya.

c. Teori : Merilee S. Grindle, Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle implementasi merupakan menciptakan tautan yang memungkinkan tujuan kebijakan diwujudkan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.⁷ Pada dasarnya, ide yang dikemukakan Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implemenasinya yaitu kebijakan ditransformasikan, lalu kemudian kebijakan tersebut dilakukan. Adapun dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk menangani kelompok bersenjata di Somalia, dalam konteks ini implementasinya adalah *Light Footprint Strategy* atau Strategi Jejak Cahaya.

Proses implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :⁸

1. Tujuan Kebijakan
2. Pengaruh pelaksanaan kebijakan

A. Isi Kebijakan

1. Kepentingan yang terpengaruh
2. Jenis Manfaat
3. Tingkat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pengambilan keputusan
5. Pelaksana Program
6. Sumber daya berkomitmen

B. Konteks Pelaksanaan

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 2. Karakteristik Institusi
 3. Kepatuhan dan daya tanggap
3. Hasil
1. Adanya dampak yang ditimbulkan
 2. Perubahan yang dapat diterima

d. Konsep Kepentingan Nasional

Pada dasarnya kepentingan nasional merupakan alasan utama akan hadirnya kepentingan nasional untuk mempertahankan eksistensinya dalam politik internasional. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, mempertahankan identitas fisik, politik, kultur dari gangguan negara lain. dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.⁹ Amerika Serikat melakukan berbagai cara dalam membantu Somalia dalam mengatasi terorisme tentu saja memiliki kepentingan. Ada dua aspek yang menjelaskan tentang

⁷ Merilee S. Grindle. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. United States of America, Princeton University press, 2017, hal. 6

⁸ Ibid., Grindle. Hal. 11

⁹ H.J, Morgenthau. *In defense of the National Interest : A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York, University Press of America, 1951

kepentingan nasional, yaitu : kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kesejahteraan umum secara keseluruhan masyarakat dan kepentingan nasional mengacu pada prinsip regulatif umum diplomasi, yang menyatakan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan unit nasional lainnya sebagai akhir dari tindakan diplomasi.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelompok Al Shabaab di Somalia

Kelompok Al Shabaab menjadi kelompok yang cukup terkenal di Somalia, bahkan di Afrika. Hal ini dikarenakan kekerasan yang dilakukan kelompok terkait dan selalu bertentangan dengan pemerintah. Adanya faktor pendorong menjadikan kelompok ini semakin meluas, apalagi di negara yang memang mengalami konflik yang belum berujung. Al Shabaab tetap mampu melakukan serangan-serangan yang cukup besar di Somalia dan negara-negara sekitarnya, seperti Kenya, penyerangan Universitas Garissa yang memakan banyak korban jiwa.

Tidak bisa dipungkiri, fenomena konflik merupakan fenomena yang cukup sering dibahas di dalam kajian hubungan internasional. Pada awalnya, Somalia terpecah menjadi dua bagian, Inggris menguasai bagian utara dan Italia

menguasai bagian selatan. Kemudian pada tahun 1960, Inggris menarik diri dari kekuasaannya, situasi ini dimanfaatkan Italia untuk menyatukan wilayah dan membentuk negara baru, Republik Somalia.¹¹ Timbullah keseimbangan wakil-wakil suku wilayah selatan dan utara sehingga membangun sebuah persatuan. Republik Federal Somalia merupakan salah satu negara yang homogen dengan populasi lebih dari 14 juta orang. Terletak di Tanduk Afrika, Somalia berbatasan dengan Ethiopia di Barat, Djibouti di Barat Laut, Teluk Aden di Utara, Samudra Hindia di Timur, dan Kenya di Barat Daya.¹² Adapun wilayah Tanduk Afrika (*The Horn of Africa*) adalah wilayah di Afrika yang cukup mengalami konflik berkepanjangan, salah satu negaranya adalah Somalia.¹³

Pada awalnya Somalia dilanda kebingungan yang timbul dari perbedaan faksi dan klan. Konflik ini muncul pasca jatuhnya Mohamed Siad Barre. Sejak penggulingannya pada tahun 1991, konflik semakin memanas. Akibat dari permusuhan klan, perselisihan kepemimpinan, adanya akses senjata yang mudah, kurangnya komitmen untuk penyelesaian yang dinegosiasikan, kurangnya stabilitas dan perdamaian. Tidak adanya kesepakatan antara pemimpin klan dan faksi menjadikan kekosongan pemerintahan pusat,

¹⁰ David Clinton. The National Interest: Normative Foundations. *The Review of Politics*, Vol. 48. 1986. hal 497-500

¹¹ Peter T. Leeson, Better off Stateless: Somalia Before and After Government Collapse. *Journal of Comparative economics*, 2007, hal. 689

¹²Somali Federal Government, About The Government, diakses dalam

<https://www.somalia.gov.so/> pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 00:30 wib

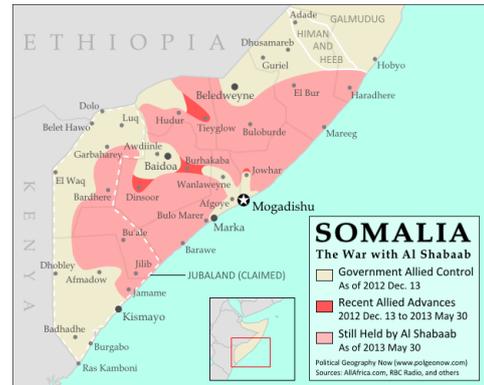
¹³ Anindya Rizky Pramoda, Peranan Ethiopia dalam Konflik di Somalia Kurun Waktu 2006-2009, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, Universitas Airlangga, hal. 54

yang kemudian pemimpin faksi dan klan membagi negara dengan wilayah kekuasaan masing-masing.

Al Shabaab sangat menentang kehadiran militer asing di Somalia, terutama misi perdamaian Uni Afrika yang didukung PBB dan Uni Eropa. Sebagian dari usahanya untuk mencapai tujuan, Al Shabaab untuk mengusir AMISOM dan intervensi militer lainnya di Somalia. Selain itu melakukan serangan-serangan di Somalia, basis serangan Al Shabaab sudah menggapai negara-negara tetangga.

Dari segi pendanaan, semua perusahaan di wilayah kekuasaan Al Shabaab memberikan uang kepada para jihadis, baik dalam bentuk pembayaran yang dibayarkan setiap bulan ataupun zakat tahunan 2,5% dari keuntungan tahunan. Pelabuhan di Mogadishu yang menjadi pendapatan utama pemerintah Somalia menjadi sasaran empuk oleh kelompok ini, mereka mendapatkan manifes kapal kargo dari pejabat pelabuhan.¹⁴ Adapun dampak regional dari Al Shabaab adalah serangan-serangan yang dilakukannya.

Gambar 1.1 Pemetaan wilayah kekuasaan Al Shabaab



Sumber : www.polgeonow.com

Al Shabaab juga menentang hadirnya intervensi asing di Somalia. pada tahun 2012, Al Shabaab mendeklarasikan bahwa kelompoknya sudah berafiliasi dengan kelompok terorisme global, yaitu: Al-Qaeda. Keputusan yang diambil oleh Al Shabaab menjadikan perubahan yang cukup besar bagi Al Shabaab, yang awalnya adalah kelompok oposisi dari pemerintah menjadi kelompok radikal global yang menjadi musuh negara super power, yaitu: Amerika Serikat. Adapun Al-Qaeda memang melebarkan sayapnya di negara-negara bagian Afrika.

Munculnya Kebijakan Light Footprint Strategy atau Strategi Jejak Cahaya

AS menjalin hubungan diplomatik dengan Somalia pada tahun 1960, kudeta pada tahun 1969 menggantikan pemerintahan terpilih Somalia dengan kekuasaan militer yang mencerminkan ketergantungan ideologis dan ekonomi kearah Uni

¹⁴ Mary Harper, "Somalia Conflict: Al-Shabaab collect more revenue than government," BBC World Service News,

2020, diakses dalam <https://www.bbc.com/news/world-africa-54690561> pada tanggal 7 Desember 2021, pukul 23:40 wib

Soviet. Namun, setelah perang melawan Ethiopia pada tahun 1970-an, Somalia mulai mengubah kiblatnya ke Barat. Pada tahun 1975, Presiden Siad Barre menyatakan hubungan dengan AS, Barre menawarkan fasilitas pengisian bahan bakar dan pasokan angkatan laut AS di Somalia, Barre menyangkal tuduhan bahwa adanya keterlibatan administrasi Uni Soviet di Somalia.

AS menjadi negara non Uni Afrika yang sering datang ke Somalia. Keterlibatan AS di Somalia sejak tahun 1992, Presiden Bush mengajukan pendapat ke PBB untuk ikut serta dalam misi UNOSOM. Namun, UNOSOM tidak membawa perubahan yang cukup signifikan bagi Somalia, padahal PBB sudah melibatkan sejumlah negara seperti Austria, Australia dan Selandia Baru. Akan tetapi AS tidak menghentikan keterlibatannya pada UNOSOM II pun AS terlibat dalam misi perdamaian ini.

AS kembali hadir pada misi perdamaian yang digagas Uni Afrika yaitu AMISOM. AMISOM diusulkan oleh Uni Afrika kepada Dewan Keamanan PBB tahun 2006. AS adalah satu-satunya negara non Uni Afrika yang terlibat langsung dalam misi perdamaian ini. Keterlibatan Militer AS di Somalia semakin meningkat, apalagi Presiden Barack Obama memperluas jaringan untuk melawan Al-Qaeda. Militer AS semakin melakukan serangan udara di Somalia dan operasi gabungan melawan Al Shabaab.

¹⁵ Chuck Jones, Recovery At Kicked Off Over 10 Years of Economic Growth, Forbes, 2020, <https://www.forbes.com/sites/chuckjones/>

Light Footprint Strategy diperkenalkan oleh Mayor Fernando M. Lujan, seorang perwira Pasukan Khusus Angkatan Darat dan Spesialis Area Asing yang berpartisipasi dalam program Aghanistan-Pakistan. Adapun tipe dari *Light Footprint Strategy* ini adalah penggunaan pesawat tidak berawak (*drones*) dan keterlibatan Intelijen. Keterbatasan sumber daya AS saat itu dan berbagai tantangan diluar negeri, menjadikan pendekatan *Light Footprint* ini dianggap sangat efektif sehingga dengan cepat menjadi salah satu strategi AS. *Light Footprint Strategy* tidak didefinisikan secara resmi sebagai doktrin Pentagon, baru baru ini, istilah *Light Footprint* menjadi singkatan media dan kebijakan modal operasi militer pasca Irak-Afghanistan.

Kebijakan ini dikeluarkan akibat krisis moneter dimasa transisi AS. Presiden Barrack Obama yang dilantik saat itu menerima tanggung jawab untuk pemulihan krisis.¹⁵ Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Barrack Obama harus memfokuskan kebijakannya dalam ruang lingkup internal, seperti memotong biaya militer yang seharusnya digunakan untuk memerangi kelompok terror.

Implementasi Pendekatan *Light Footprint Strategy* Terhadap Kelompok Al Shabaab

Tujuan Kebijakan

AS sebagai negara kontraterorisme menggunakan strategi jejak cahaya sebagai alternatif

[2020/02/17/obamas-2009-recovery-act-kicked-off-over-10-years-of-economic-growth/?sh=4cff4ad668b7](https://www.forbes.com/sites/chuckjones/) diakses pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 13:12 wib

dalam memerangi terorisme guna menghemat anggaran akibat krisis yang terjadi.

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan

Tiga hari setelah serangan 11 September, Kongres mengesahkan *Authorization for Use of Military Force* (AUMF) pada tahun 2001 yang mengizinkan tindakan militer terhadap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas serangan 9/11 dan yang menyembunyikannya. Sejak itu, presiden menafsirkan AUMF untuk serangan pesawat tidak berawak di seluruh dunia.

a. Isi Kebijakan

Adapun isi dari AUMF yang diloloskan Kongres AS terhadap kontraterorisme, sebagai berikut :¹⁶

“Section 2(a) of the 2001 AUMF authorizes the President, to use all necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, or harbored such organizations or persons, in order to prevent any future acts of international terrorism against the United States.”

¹⁶ Stephanie Savell, *The 2001 Authorization for Use of Military Force: A Comprehensive Look at Where and How it*

Di bawah AUMF ini, Kongres melepaskan kekuatan perang yang ditetapkan secara konstitusional dalam perang melawan terorisme, semua tanggung jawab dan wewenang diserahkan kepada Presiden untuk melakukan serangan ataupun perang. Presiden juga wajib melaporkan kepada Kongres apa yang terjadi, seperti kekuatan yang diterapkan atau hal yang akan terjadi.

Kepentingan yang mempengaruhi, AS sebagai negara superpower dan berkomitmen menangani terorisme pasca 9/11 memiliki kepentingan untuk mempertahankan eksistensi negaranya. AS sangat kuat dalam menyuarakan kontraterorisme. Pada dasarnya inilah kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan *Light Footprint Strategy* tersebut.

Jenis Manfaat, Adalah jenis manfaat yang kemudian menunjukkan suatu hal yang dihasilkan. AS melakukan serangan pesawat tidak berawak yang kemudian dikenal dengan *Light Footprint* berawal dari krisis moneter dalam masa transisi Obama. Sehingga penggunaan pesawat tidak berawak menjadi alternatif bagi AS untuk menerapkan *no boots on the ground* dan meminimalisir biaya militer.

Tingkat perubahan yang diinginkan, Perubahan yang diinginkan AS tentu saja menangani kelompok yang kemudian menjadi kelompok teroris global di Somalia, yaitu Al Shabaab. Dalam implementasi kebijakan tingkat perubahan yang diharapkan adalah tujuan dari suatu kebijakan yang

Has Been Used. Brown University, 2021, hal.3

diterapkan sebagai tujuan awal dari suatu kebijakan.

Kedudukan pengambilan keputusan, Kongres AS yang memberikan mandat kepada Presiden AS.

Pelaksana Program, Pelaksana program adalah implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkomitmen. Militer AS dan CIA adalah instansi yang melaksanakan kebijakan-kebijakan mengenai serangan pesawat tidak berawak di Somalia.

Sumber daya berkomitmen, Dalam implementasi ini yang dimaksudkan dengan sumber daya berkomitmen adalah sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. AS menjadi pemasok militer dan pelaksana dari *Light Footprint strategy* adalah pendukung dari jalannya implementasi ini. Selain itu, Perdana Menteri Abdiweli Moh Ali dari pihak Somalia menyetujui kebijakan ini dengan syarat tetap adanya koordinasi dengan negaranya.

b. Konteks Pelaksanaan

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, AS sebagai negara superpower yang ingin menangani Al Shabaab yang berafiliasi dengan kelompok terorisme global yaitu Al Qaeda, dimana Al-Qaeda menyerang Pentagon pada 11 September. Kemudian menjadi kilas balik AS untuk menangani semua jaringan

yang dianggap menjadi ancaman bagi negaranya.

Karakteristik Institusi, Adapun karakteristik militer merupakan elemen masyarakat bukan sipil yang mempunyai komdando terpusat, hierarki, disiplin, dengan tugas menjaga keamanan dan pertahanan suatu negara. Peran militer menjadi penting dalam implementasi kebijakan *Light Footprint* ini, karena kekuasaan suatu negara atau rezim akan kuat jika mendapat dukungan militer. Militer AS dan CIA menargetkan Al Shabaab dengan menggunakan pesawat tidak berawak. Dimana CIA mencari informasi atas posisi yang ditargetkan dan melakukan serangan udara.

c. Hasil

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pada dasarnya hal ini bisa dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, dan disposisi.¹⁷ Sayangnya kebebasan berekspresi di Somalia masih sangat dibatasi ditandai dengan penangkapan wartawan di Somalia secara sewenang-wenang, sehingga sulit sekali untuk mengetahui tanggapan masyarakat Somalia atas kebijakan ini.

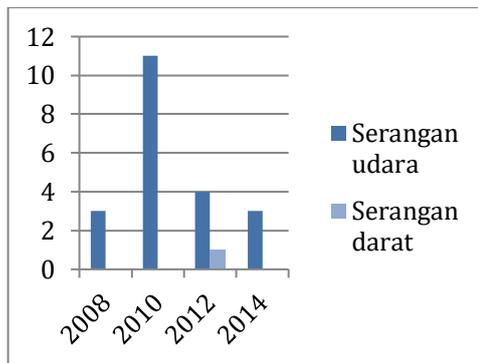
Dampak yang timbul, Dampak yang timbul atas serangan udara AS adalah banyaknya korban yang bukan anggota Al Shabaab dan merusak properti.

¹⁷ Edward III, George C. *Public Policy Implementing*. London, Jai Press Inc, 1984, hal. 9-10

Perubahan yang dapat diterima, Kematian pemimpin Al Shabaab pada 2014 yaitu Ahmed Abdi Godane.

Adapun operasi tidak berawak AS di Somalia berdasarkan tahun, sebagai berikut:

Grafik 1.1
Serangan Udara dan Darat AS di Somalia

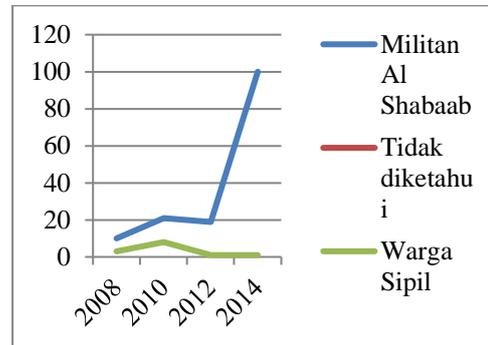


Sumber : www.somaliapublicdata

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa serangan udara di Somalia lebih sering dilakukan daripada serangan darat. Dari 2008-2014, serangan yang paling banyak dilakukan oleh militer AS adalah serangan udara, mereka hanya melakukan serangan konvensional sekali di tahun 2013.

AS memang sudah berkomitmen melakukan operasi-operasi rahasia dan serangan-serangan udara yang menewaskan beberapa pemimpin kunci Al Shabaab, namun korban masyarakat sipil dan kerusakan properti sama sekali tidak bisa di hindari.

Grafik 1.2
Korban Serangan Udara AS di Somalia



Sumber : www.somaliapublicdata

SIMPULAN

AS berkomitmen untuk tidak sering melakukan perang konvensional atau *no boots on the ground* untuk memerangi terorisme di Somalia, hal ini akibat krisis moneter dimasa transisi Presiden Barrack Obama. Sehingga Obama memotong biaya militer yang seharusnya di gunakan untuk memerangi kelompok yang dianggap terorisme. Kemudian AS menggunakan strategi jejak cahaya atau *Light Footprint Strategy* sebagai alternatif dalam memerangi terorisme.

Implementasi *Light Footprint* AS ini sangat lekat dengan kepentingan yang mempengaruhi, setiap tahapan-tahapan dan tingkat perubahan yang diinginkan AS sebagai pembuat kebijakan menjadi keuntungan bagi pembuat kebijakan. Sejauh ini hasil yang dapat diterima adalah kematian para pemimpin Al Shabaab, kemudian AS mengklaim keberhasilan atas serangan udara nya. Sayangnya eksistensi Al Shabaab di Somalia sampai saat ini cukup kuat. Serangan-serangan yang dilakukan pun semakin gencar tidak hanya di Somalia saja, melainkan ke berbagai negara di Afrika. Saat ini Al Shabaab adalah kelompok bersenjata yang

sangat diperhitungkan di Afrika sebagai kelompok yang cukup mematenkan.

Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle ini menjelaskan bahwa pada dasarnya implementasi merupakan upaya untuk menafsirkan suatu kebijakan, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam suatu program aksi. Dengan demikian implementasi erat kaitannya dengan hasil tertentu, bisa menjadi negatif atau positif. Sehingga angkaian-rangkaian implementasi kebijakan ini sangat mempengaruhi hasil yang diinginkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Britannica, "Al-Shabaab Somali-based militant group," diakses dalam <https://www.britannica.com/topic/al-Shabaab> pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 23:11 wib
- Chuck Jones, Recovery At Kicked Off Over 10 Years of Economic Growth, Forbes, 2020, <https://www.forbes.com/sites/chuckjones/2020/02/17/obamas-2009-recovery-act-kicked-off-over-10-years-of-economic-growth/?sh=4cff4ad668b7> diakses pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 13:12 wib
- Claire Felner, Jonathan Masters, dan Mohammed Aly Sergie, "Al-Shabaab, Council on Foreign Relations," diakses dalam <https://www.cfr.org/background/al-shabab> pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 20:12 wib
- Clinton, David. 1986. *The National Interest: Normative Foundations*. The Review of Politics, Vol. 48
- Edward III, George C. 1984. *Public Policy Implementing*. London, Jai Press Inc
- Grindle, Merilee S. 2017. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, United States of America, Princeton University press
- H.J, Morgenthau. 1951. *In defense of the National Interest : A Critical Examination of American Foreign Policy* New York, University Press of America
- International Relations Theory. 2017. *Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional*, England, E-International Relations Publishing
- Leeson, Peter T. Better off Stateless: Somalia Before and After Government Collapse, *Journal of Comparative economics*, 2007, hal. 689
- Maruf, Harun dan Dan Joseph. 2018. *Inside Al Shabaab : The Secret History of Al-Qeda's Most Powerful Ally* Bloomington, India University Press
- Mary Harper, "Somalia Conflict: Al-Shabaab collect more revenue than government," BBC World Service News, 2020, diakses dalam <https://www.bbc.com/news/world-africa-54690561> pada

tanggal 7 Desember 2021,
pukul 23:40 wib

7.htm pada tanggal 24 Maret
2021, pukul 00:16 wib

Pramoda, Anindya Rizky. Peranan Ethiopia dalam Konflik di Somalia Kurun Waktu 2006-2009, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, Universitas Airlangga, hal. 54

Savell, Stephanie . 2021. *The 2001 Authorization for Use of Military Force: A Comprehensive Look at Where and How it Has Been Used*, Brown University

U.S. Department of State Archive, "The Global War on Terrorism: The First 100 Days," diakses dalam <https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/694>